

**PEMERINTAHAN SULTAN HAMENGKU BUWONO II DI KASULTANAN  
NGAYOGYAKARTA HADININGRAT TAHUN 1792-1810**

**Ratih Dwi cahyani**

**084284245**

**ABSTRAK**

Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi dengan gelarnya Sultan Hamengku Buwono I. Sultan HB I merupakan ayah dari RM.Sundoro. Semeninggal ayahnya, RM Sundoropun dinobatkan menjadi Sultan dengan gelar Sultan Hamengku Buwono II. Mulai pada 2 April 1792 Sultan HB II memerintah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan berbagai macam kebijakan. Semasa pemerintahannya Sultan HB II berusaha untuk tidak bekerjasama dengan penjajah. Sultan HB II sadar bahwa perpechan yang selama ini terjadi di kalangan raja-raja Jawa dan pengurangan daerah kekuasaan merupakan akibat lemahnya hegemoni seorang raja akibat dari adanya kontrak politik antara raja Jawa dengan penjajah. Untuk mempertahankan kekuasaannya, Sultan HB II memperkuat militer Kasultanan dan memperkuat identitas kasultanan dengan budayanya yang khas. Ini yang membedakan antara pemerintahan Sultan HB I dengan pemerintahan Sultan HB II. Yang mana pada masa pemerintahannya Sultan HB I berkonsentrasi pada pembangunan Kraton dan penataan pemerintahan. Sedang Sultan HB II menitik beratkan pada bidang sastra dan seni di mana semasa selama Sultan HB II memerintah telah menghasilkan banyak karya sastra dan seni yang dapat dinikmati sampai pada saat ini. Berakhirnya pemerintahan Sultan HB II disebabkan oleh sikap Raden Ronggo yang menolak permintaan pemerintah kolonial untuk menyerahkan kayu jati pada pemerintah kolonial yang akhirnya Raden Ronggopun dianggap memberontak oleh penjajah. Akibat dari peristiwa ini Sultan HB II bersedia turun tahta namun tetap tinggal di kraton dan tahtanya digantikan oleh putranya.

**Kata kunci : pemerintahan, Sultan HB II, Kasultanan Yogyakarta.**

**ABSTRACT**

Sultanate of Yogyakarta Sultanate is a fraction of the Mataram kingdom that was founded by Prince Mangkubumi the title lane I. Sultan HB I was the father of RM.Sundoro. Semeninggal father, RM Sundoropun crowned with the title of Sultan lane II. Starting on 2 April 1792 Sultan HB II reigned Sultanate Ngayogyakarta with a variety of policies. During the reign of Sultan HB II tried to not cooperate with the occupiers. Sultan HB II realized that perpechan that has been happening in the Javanese kings and turf reduction is due to the weakness of a king due to the hegemony of the political contract between the king of Java with the invaders. To retain power, Sultan HB II military Sultanate strengthen and reinforce cultural identity with a distinctive Sultanate. It's the difference between the rule of Sultan HB I to the reign of Sultan HB II. Which in the reign of Sultan HB I concentrate on the development and structuring of the government palace. Medium Sultan HB II focuses on the field of literature and art, where during the long reign of Sultan HB II has produced many works of literature and art that can be enjoyed up to now. The end of the reign of Sultan HB II caused by the attitude of Raden Ronggo the colonial government refused a request to hand over the teak colonial government finally Raden Ronggopun by rebellious colonists. As a result of these events Sultan HB II willing to step down but stay in the palace and his throne was replaced by his son.

**Key word : reign, Sultan HB II, Yogyakarta Sultanate.**

## PENGANTAR

Pada masa awal berdirinya kraton Jogjakarta (semasa pemerintahan Sultan Hamengku Buwono I) konsep pemerintahan ketuhanaan dipraktikkan dan bertahan hingga pemerintahan Sultan Hamengku Buwono VIII, sampai kemudian berakhirnya penjajahan Belanda. Tugas utama sultan adalah menjadi Sang Murba Wisesa pemegang kekuasaan tertinggi, menjaga ketertiban dan ketenangan negara. Sultan juga bertanggung jawab untuk memelihara dan melestarikan kerajaan. Sultan harus cukup kuat menghadapi pasang-surut kerajaan yang tak terhindarkan, siklus yang di sepanjang sejarah Jawa dikenal sebagai ‘perpecahan-persatuan-pemisahan-perpecahan.

Sultan HB I memerintah kurang lebih selama 37 tahun, yaitu dari tahun 1755 sampai pada tahun 1792. Semasa HB I memerintah, HB I telah menunjuk seorang dari putranya untuk menggantikan tahtanya di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dari sekian banyak putranya, HB I menunjuk RM.Sundoro (dari permaisurinya yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten). RM.Sundoro ditunjuk sebagai putra mahkota karena RM Sundoro merupakan anak permaisuri, setelah meninggalnya Sultan HB I RM.Sundoro dinobatkan sebagai Sultan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan gelar *Sultan Hamengku Buwono Ngabdurrachman Sayidin Panatagama Kalifatullah Tanah Jawa Ingkang Kaping Kalih* atau Sultan Hamengku Buwono II (selanjutnya disebut Sultan HB II).

Sebagai seorang raja Jawa Sultan HB II banar-benar memahami statusnya sebagai raja Jawa. Dalam pandangannya, raja adalah penguasa dari semua yang terdapat di wilayah kekuasaannya (*salumahing bumi sakurebing langit: Serat Suryaraja, 1774*). Juga merupakan seorang sultan yang fenomenal karena beliau, merupakan sultan Yogyakarta satu-satunya yang seumur hidupnya tidak mau tunduk kepada Pemerintah Kolonial Belanda. HB II sanggup berkorban demi rakyatnya, gigih

dalam perlawanan terhadap penjajahan demi kemakmuran kesultananya.

Dalam pergantian empat rezim kolonial yang berkuasa di Jawa, yakni VOC, pemerintah batak dan prancis, pemerintah sementara Inggris, dan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, Sultan HB II selalu menolak tuntutan-tuntutan penguasa saat itu, sebagai akibatnya hal ini menuai kecaman dari penjajah tersebut sehingga membuat HB II tiga kali diturunkan tahtanya dan mengalami pembuangan ke Pulau Pinang dan Ambon. Peristiwa pembuangan Sultan HB I ini yang menyebabkan beliau digantikan anaknya namun demikian beliau dapat kembali memegang tampuk pemerintahan di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Memunculkan pertanyaan kenapa sultan HB II sangat anti penjajah dan dengan gigih melawan penjajah karena HB II beranggapan bahwa tumpah darah memang harus dibela, mengingat di sinilah orang tua, leluhur dilahirkan, dibesarkan, dan kelak dikubur. Mengakibatkan HB II berkali-kali tegang, konflik dan berperang dengan penjajah. Seperti dengan pengetahuan umum bahwa orang berpolitik harus bersedia menanggung 3B (Bui, Buang, Bunuh). Sultan HB II sudah terbiasa merasakan pahit getirnya perjuangan. Betapa tidak, sebagai raja berdaulat penuh dan sah, beliau kerap diperlakukan sewenang-wenang oleh penjajah, Sultan HB II pernah dibuang ke pulau Pinang dan Ambon.

Pemaparan diatas memunculkan ketertarikan penulis untuk menulis tentang Sultan Hamengku Buwono II. Selain alasan ketertarikan itu hal ini juga didorong oleh sangat minimnya penulisan karya sejarah tentang pemerintahan. Kebanyakan yang penulis menulis tentang Sultan HB I sebagai pendiri kasultanan, selain Sultan HB I yang telah banyak ditulis adalah Sultan HB IX dan X. Sehingga kebanyakan orang tidak mengenal siapa sosok Sultan HB II dan bagaimana perjuangannya dalam melawan penjajah.

## PEMBAHASAN

## Pembangunan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

Perjanjian Gianti merupakan pemecah kerajaan Mataram yang disebabkan oleh campur tangan VOC dalam pemerintahannya. Perjanjian gianti itupun merupakan titik awal dimana merupakan sebab lahirnya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat (Kasultanan Yogyakarta). Namun kasultanan Yogyakarta tidak semata-mata langsung berdiri dengan pemerintahan dan birokrasi yang lengkap. Pemerintahan dan birokrasi ini mulai ditata pelan-pelan oleh penguasanya yaitu Sultan Hamengku Buwono II.

Pembangunan Kasultanan Yogyakarta tidak mengalami hal yang mudah melainkan juga masih mengalami peperangan untuk menegakkan wilayahnya. Walaupun sudah jelas disebutkan dalam perjanjian gianti tentang wilayah Kasultanan Yogyakarta. Namun pertahanan wilayah tetap dilakukan mengingat ada pihak lain yang menginginkan pencaplokan terhadap wilayah kasultanan tersebut.

Perjuangan Sultan HB I ini dilakukan tidak sendirian melainkan diikuti oleh pengikutnya yang termasuk di dalamnya adalah keluarga dan sanak familinya. Setelah perjuangan penegakan wilayah ini dilakukan sampai pada pembangunan kraton. Karena setelah pembangunan kraton pemerintahan sudah dapat dijalankan dengan baik. Sehingga penegakan wilayahpun lebih mudah dilakukan. Adapun luas wilayah Kasultanan Yogyakarta mencapai 53.100 karya atau cacah dari negaragung Mataram dan 33.950 karya dari monconegoro. Wilayah Yogyakarta mencakup seluruh wilayah Mataram, Gunung Kidul, Grobogan, sebagian Kedu dan Bagelen sebagai wilayah negaragung. Selain itu, Kasultanan Yogyakarta juga memperoleh Madiun, Magetan, Caruban dan sebagian Pacitan, Japang dan Jipang sebagai daerah Teras Karas. Dan makam raja-raja lama di Selo.

Semua wilayah diatas dijadikan sebagai daerah Monconegoro Wetan. Di sebelah barat

Kasultanan Yogyakarta memperoleh daerah *Romo* yang kemudian dijadikan sebagai wilayah Monconegoro kulon. Pembagian ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengaturan pemerintahan. Sehingga pemerintahan Kasultanan Yogyakarta dapat berjalan dengan lancar dan merata.

### Sultan RM. Sundoro Naik Tahta

Pada tanggal 24 Maret 1792 Sultan HB I (yaitu ayah dari RM Sundoro) wafat. Mengakibatkan kekosongan pemerintahan di Kasultanan Yogyakarta. Sesuai dengan tradisi RM Sundoro yang berstatus Putra Mahkota seharusnya menggantikan ayahnya menjadi raja di Yogyakarta. Namun menurut perjanjian antara Sultan HB I dengan VOC yaitu mengenai pergantian tahta raja harus mendapatkan persetujuan dari VOC walaupun pewaris tahta sudah mempunyai gelar putra mahkota.

Pelantikan RM.Sundoro tidak dapat segera dilakukan. Setelah melapor pada Gubernur VOC tentang pergantian tahta, kemudian Gubernur VOC beragkat ke Yogyakarta pada tanggal 29 Maret 1792. Gubernur VOC disambut oleh Patih Danurejo dan RM Sundoro, dalam kesepakatan dicapai bahwa RM Sundoro akan dilantik pada tanggal 2 April 1792 secara resmi Ia menduduki tahta Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengku Buwono Ngabdulrachman Sajidin Panatagama Kalifatullah Tanah Jawa Ingkang Kaping Kalih (Sultan Hamengku Buwono II).<sup>1</sup>

Demikian mulailah pemerintahan Sultan HB II menjabat sebagai sultan di kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Dilantiknya Sultan HB II ini, membawa kabar baik untuk VOC agar dapat memperbaharui kontrak politiknya dengan penguasa yang baru, diikuti penekanan baru dan tuntutan yang baru yang

<sup>1</sup> Arsip kontrak politik antara Sultan Hamengku Buwono II dengan VOC tentang *Pengangkatan Sultan Hamengku Buwono II sebagai sultan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*, koleksi Arsip Nasional Indonesia.

menguntungkan pihaknya. Dengan jabatannya seorang sultan namun HB II menyadari bahwa tetap ada campur tangan Belanda dalam pemerintahannya. Namun HB II berusaha tak menghiraukan kontrak politik yang telah ditandatangani olehnya dan gubernur Jendral VOC.<sup>2</sup>

Dirasa tidak menguntungkan bagi HB II untuk mengikuti kontrak politik yang jelas akan membuat wilayah kekuasaannya dan kewibawaannya berkurang. HB II sangat faham setiap kontrak politik yang disodorkan oleh VOC merupakan bom atom yang dengan mudahnya dapat meledak dan menghancurkan semua yang ada disekelilingnya. Pelajaran ini dipetikinya dari penguasa-penguasanya yang terdahulu yang tidak dapat menolak kontrak politik ini dan dengan mudahnya mengabdikan permintaan VOC tanpa sadar mereka dirugikan. Di setiap pelantikan pasti yang mendapat keuntungan adalah pihak VOC, tapi tidak demikian dengan dilantikannya Sultan HB II ini karena HB II punya cara tersendiri untuk menolak tuntutan dari pihak VOC walaupun dengan berbagai kecaman.

### **Pemerintahan ke dalam Sultan HB II**

Setelah menduduki tahta dan berkuasa sebagai sultan, Sultan HB II tidak banyak mengalami perubahan, HB II menyadari bahwa kekuasaan dan tindakannya saat ini tetap berada di bawah pantauan VOC. Apabila HB II bertindak tanpa ijin dari pihak VOC maka berarti HB II melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh raja-raja sebelumnya, akan mengakibatkan kuatnya kekuasaan VOC di tanah Jawa. Belajar dari pengalaman raja-raja Mataram dan ayahnya, HB II mengambil pelajaran bahwa kekuasaan raja-raja Jawa semakin sempit, sedangkan kekuasaan VOC semakin luas. Walaupun tidak pernah terjadi peperangan secara langsung sejak penyerbuan

yang dilakukan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1628-1629.

Selain masalah pengurangan wilayah masalah lain yang juga muncul akibat campur tangan VOC adalah perpecahan yang terjadi pada raja-raja Jawa, perpecahan terjadi karena pengaruh dan intervensi VOC pada pemerintahan dalam kraton. Intervensi VOC ini timbul sejak pengangkatan patih Mataram pada tahun 1743 yang harus mendapat persetujuan dari pejabat VOC, dari sinilah langkah awal pemaksaan VOC kepada raja-raja Jawa dimulai. Patih yang dulunya merupakan tangan kanan raja tak lagi sepenuhnya tunduk pada raja melainkan harus memihak pada kepentingan VOC, ketika terjadi perbedaan pendapat antara raja dan VOC.<sup>3</sup>

Sultan HB II sangat menyadari bahwa propaganda dilakukan untuk menjatuhkan wibawa raja, sehingga VOC dengan mudah dapat menguasai wilayah Jawa. Melihat situasi tersebut Ia tidak mungkin untuk berpangku tangan membiarkan VOC ikut campur tangan dalam pemerintahan yang seharusnya hanya seorang raja yang satu-satunya berhak untuk memegang sepenuhnya tampuk pemerintahan. Ia bertekad untuk membatasi intervensi asing ke dalam Kratonnya sambil memperkuat diri dan keluarganya agar tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan penguasa asing. Apabila HB II menunjukkan kelemahannya dan tetap tunduk pada VOC, HB II akan semakin keras dituntut dan dipaksa oleh VOC.

Tujuan Sultan HB II untuk melakukan perlawanan terhadap VOC sudah mulai tampak sejak mangkatnya Sultan HB I dan menjelang kenaikan tahtanya. Sebagai pemegang tahta yang baru sebelum pelantikannya Ia harus menandatangani kontrak baru pula dengan pemerintah VOC, kontrak yang berisi tentang hubungan antara penguasa VOC dan Kesultanan Yogyakarta, disebutkan juga bahwa Sultan HB II harus memberikan pengakuan

<sup>2</sup>Sastronaryatmo, Moelyono, 1981, *Babad Mangkubumi*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

<sup>3</sup>Soedarsiman PoerwoKoesoemo, op.cit., hlm, 54.

yang besar terhadap utusan VOC yang mewakili kepentingan VOC di kraton, selain itu ada beberapa konsesi yang harus dipenuhi oleh Sultan HB II. Kontrak ini dimaksudkan untuk menyamakan kedudukan penguasa VOC dengan raja-raja Jawa, dengan demikian mereka dengan mudah dapat merendahkan wibawa raja-raja Jawa. Namun dalam hati Sultan HB II tidak ingin memenuhi permintaan VOC tersebut karena Ia berpendapat bahwa perlakuan terhadap mereka harus dibedakan agar tradisi dan kekuasaan raja Jawa tidak direndahkan oleh para utusan asing.<sup>4</sup>

Sultan HB II menyadari bahwa tidak mungkin menentang VOC secara terbuka. Namun patih Danurejo I menyetujui ide Sultan HB II untuk tidak menyetujui tuntutan dari Van Overstraten (pejabat VOC yang menjabat sebagai Gubernur Pantai Laut Timur Jawa) tentang kontrak yang menyebutkan pengakuan yang besar pada pejabat VOC di kraton. Akhirnya Sultan HB II mengusulkan pada Gubernur VOC agar persoalan itu tidak dimuat pada kontrak politik, desakan ini akhirnya disetujui oleh Van Overstraten, alasannya penerimaan usulan ini adalah instruksi dari Gubernur VOC sebelumnya yaitu Willem Arnold Alting agar tetap menjaga hubungan baik raja-raja Jawa sehingga tidak merugikan VOC. Sultan HB II merasa dirinya telah memenangkan perdebatan politik ini, karena hampir tidak ada perubahan kontrak politik antara masa pemerintahan ayahnya dan dirinya.

Peristiwa di atas membuat Sultan HB II merasa sudah selayaknya raja-raja Jawa bertindak tegas pada para penjajah yang datang ke Nusantara. Ia berpendapat bahwa bukan raja Jawa yang tunduk pada VOC namun sebaliknya mengingat bahwa raja merupakan penguasa tertinggi. Dengan demikian VOC sulit untuk menanamkan intervensinya. Hal ini mengakibatkan Gubernur VOC pengganti Van Overstraten yaitu Wouter Hendrik Van Ijsseldijk lebih berhati-hati pada Sultan HB II. Ia

tahu bahwa Sultan HB II adalah orang yang berkepribadian keras dan anti-Belanda, apalagi dengan dukungan Patih Danurejo I, kedudukannya pasti sangat kuat. Ketika Patih Danurejo wafat pada tanggal 19 Agustus 1799, yang kemudian digantikan oleh Patih Danurejo II. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh VOC untuk merubah kontrak atau perjanjian politik dengan alasan perjanjian politik yang lama adalah perjanjian yang dibuat pada masa kerajaan Mataram yang pada masa ini sudah tidak ada lagi. Usulan ini kemudian disahkan oleh Sultan HB II pada tahun 1799, dalam kontrak politik yang baru pemerintah Belanda berhak ikut menentukan Patih yang akan diangkat. Yang pada akhirnya menantu sultanlah yang diangkat sebagai Patih, dengan gelar Patih Danurejo II (sebelumnya bernama Tumenggung Mertonegoro cucu dari Patih Danurejo I). Sejak awal sikap Danurejo I menunjukkan ketidakcocokan dengan mertuanya, Ia cenderung memihak VOC karena menurutnya pemerintah Belanda lebih dapat dipercaya untuk melindungi posisinya.

### **Pemerintahan keluar Sultan HB II**

Sejak itu kebijakan Sultan HB II ditunjukkan untuk menjaga integritas dan kewibawaan Kesultanan Yogyakarta. Sultan HB II melihat bahwa VOC merupakan ancaman utama yang membahayakan kedudukannya. Karena masa lalu telah membuktikan bahwa dengan adanya intervensi Belanda kerajaan Mataram runtuh dan terpecah menjadi dua yaitu Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta, wilayah kerajaan Matarampun berkurang dengan hilangnya wilayah di sepanjang pantai utara Pulau Jawa hingga ujung timur Pulau Jawa.

Untuk mewujudkan tujuannya Sultan HB II merintis jalan dengan menyatukan kembali kekuatan-kekuatan yang bersumber dari kerajaan Mataram. Ia merasa bahwa konflik antara Kasultanan Yogyakarta dengan Kadipaten Mangkunegaran juga dengan Kasunanan Surakarta harus diakhiri. Konflik antara Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten

---

<sup>4</sup>Margana, S., 2004, *op.cit.*, hlm. 68.

Mangkunegaran terjadi sejak sebelum disahkan perjanjian Gianti yang bersumber perbedaan pandangan antara kedua penguasa. Sedangkan konflik antara Kasultanan Yogyakarta dengan Kasunanan Surakarta terjadi sejak peristiwa perlawanan Sunan Paku Buwono IV (Sunan PB IV) terhadap VOC, namun dalam menyelesaikan Hartsing (residen Surakarta) meminta bantuan Sultan HB I dan Mangkunegoro I (saat inilah kedua penguasa menjalin kerjasama kembali sejak tahun 1755). Sultan HB I mengirim RM Sundoro untuk membantu VOC, dari sinilah konflik itu terjadi. Dari peristiwa ini Sunan PB IV merasa dendam pada Sundoro karena dianggap ikut membantu Belanda untuk menggagalkan rencananya.

Konflik di atas diperparah lagi dengan adanya masalah perbatasan wilayah. Akan tetapi kadang kala kesamaan tujuan mendekatkan hubungan kedua raja Jawa tersebut. Masalah perbatasan wilayah ini terselesaikan dengan adanya pembangunan tugu yang menjadi pembatas bagi kedua wilayah, penyelesaian ini muncul setelah keduanya mengadakan perundingan yang dihadiri juga oleh Gubernur VOC, Namun konflik keduanya tetap berjalan. Jalan untuk penyatuan kekuatan bekas Mataram sulit diwujudkan.

Sikap Sultan HB II terhadap Pemerintah Belanda yang menggantikan VOC tetap keras dan sangat anti-Belanda, HB II menolak keras kontrak politik baru yang disodorkan oleh Van Den Berg (pengganti Ijsseldijk yaitu residen Yogyakarta). Sikap kerasnya ini mendorong Van Den Berg untuk mengadu pada Gubernur Pantai Timur Laut Jawa untuk melengserkan Sultan HB II. Kemudian Van Den Berg mengusulkan pangeran Notokusumo untuk naik menggantikan ayahnya, karena menurutnya Pangeran Notokusumo lebih mudah untuk diajak bekerjasama.

Usulan dari Van Den Berg itu ditolak karena tidak ada bukti tentang kesalahan Sultan HB II yang melanggar isi kontrak yang telah disepakati, dan urusan penggantian tahta bukanlah wewenang seorang Gubernur. Karena

tidak nyaman dengan tindakan keras sultan kemudian Van Den Berg mengirim surat ke Batavia untuk dipindah tugaskan, akhirnya Van Den Berg dipindahkan ke Surakarta. Dan kedudukannya digantikan oleh Waterloo, Waterloo sudah mendengar tentang Sultan HB II dan bermaksud menghadapinya dengan strategi baru.

Waterloo berusaha melemahkan kedudukan sultan dengan mendekati orang-orang yang tidak puas dengan kondisi yang ada, orang-orang tersebut adalah para menantu sultan dan putra mahkota namun ada juga kelompok netral yaitu Patih Danurejo II. Waterloo berusaha mengadu antara dua kelompok yang berseteru kemudian merangkul Patih Danurejo II untuk menjadi informannya. Patih Danurejo II pun menerima rangkulan dari Waterloo karena Ia membutuhkan perlindungan dan dukungan untuk terus menduduki posisinya.

Pergaulannya dengan kelompok yang bersekutu dan Patih Danurejo II, Waterloo dapat menilai yang mana yang dapat digunakannya sebagai senjata untuk melancarkan tuntutannya pada sultan, Waterloo memilih Pangeran Notokusumo karena dinilainya mempunyai hubungan dan pandangan yang baik terhadap pemerintah Belanda. Pangeran Notokusumo lebih banyak berperan menjadi penengah antara Sultan HB II dengan pemerintah Belanda. Dengan demikian Waterloo dapat menjaga kestabilan politik guna mencegah konflik kepentingan di Yogyakarta.

Sultan HB II menyadari bahwa Kesultanan Yogyakarta secara politik berada pada posisi yang berbahaya. Adanya berbagai ancaman muncul terhadap hegemoni Kesultanan Yogyakarta. Ancaman ini muncul dari pihak Belanda dan penguasa Jawa lainnya. Hal ini terjadi sejak adanya perjanjian politik antara raja pendahulunya dengan pihak Belanda, walaupun dalam perjanjian politik itu terdapat pasal-pasal yang tentang perlindungan dari Belanda untuk Kasultanan Yogyakarta, namun Kasultanan Yogyakarta semakin lemah karena terjadi perpecahan terselubung dalam

pemerintahan dan merosotnya hegemoni kekuasaan raja.

Untuk menghadapi ancaman dari Belanda dan para penguasa Jawa lainnya, Sultan HB II yakin bahwa dirinya harus berbuat sesuatu dengan mengandalkan apa yang dimilikinya dengan kekuatannya sendiri. Keyakinannya ini didapat karena HB II berbeda dengan ayahnya yang sibuk dengan masalah konsolidasi Kesultanan. HB II tidak perlu lagi mengurus masalah itu karena bawahannya telah sepakat tunduk kepadanya sebagai penguasa yang sah, sehingga HB II percaya penuh pada kemampuan dan kesetiaan bawahannya sebagai abdi Kasultanan Yogyakarta. Inilah yang dapat dijadikan senjata untuk membangun Kasultanan Yogyakarta tidak hanya sebagai kekuatan politik juga kekuatan militer yang ditakuti dan disegani oleh lawannya.<sup>5</sup>

Sultan HB II yang sangat percaya pada kekuatan dirinya dan barisan pendukungnya, HB II memilih tegas terhadap Belanda dan menunjukkan bahwa Kasultanan Yogyakarta harus memiliki kekuatan untuk menandai dan meningkatkan posisi tawarnya, bertindak aktif dalam membangun dan menjaga keutuhan wilayahnya. Untuk pertahanan wilayah kesultanan, HB II menambah pasukan dan perluasan kesatuan prajurit Kraton. Para bangsawan dan pejabat tinggi kraton diperkenankan memiliki prajurit sendiri, perlengkapan dan persenjataan disediakan oleh kraton. Namun apabila kraton memerlukan tenaga militer mereka harus siap membantu.

Usaha Sultan HB II untuk memperkuat militernya adalah dengan menambah meriam yang ditempatkan di tembok benteng. Langkah lain yang ditempuh sultan adalah mengganti panglima pasukan kraton, hal ini dilakukan dengan mengganti Tumenggung Notoyudo dengan menantunya Sumodiningrat. Tentang penggantian ini mendapat protes dari Gubernur Jendral Van Den Berg, Van Den Berg

mengutus residen Yogyakarta untuk mengusulkan pada Sultan HB II untuk mengembalikan kembali posisi Notoyudo karena Van Den Berg mengetahui bahwa Sumodiningrat adalah orang yang sangat setia pada sultan. Ini akan membahayakan pemerintah Belanda. Sultan akhirnya mengabulkan tuntutan pemerintah Belanda tersebut, HB II menggantikan Sumodiningrat dengan menantunya yang lain yaitu Raden Ronggo Prawirodirjo namun dengan pengangkatan ini hubungan antara Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta semakin memanas karena terjadi kisruh perihal perbatasan wilayah.<sup>6</sup>

Raja merupakan pucuk pemimpin tertinggi sebagai kepala militer dari sumber kehormatan militer yang berperan sebagai senapati atau pemimpin perang. Namun ketika jumlah pasukan ditingkatkan maka raja akan memilih para pangawa untuk menjadi seorang *wedana* atau komandan pasukan. *Wedana* ini merupakan komandan yang diambil dari orang-orang kepercayaan raja yang bergelar Tumenggung. Sedangkan *wedana* berada dibawah *Bupati Nayaka* yang bergelar Pangeran Haryo.<sup>7</sup> Dibawah *wedana* terdapat empat *lurah* atau *tindih* yang memimpin kompi, masing-masing terdiri dari delapan puluh orang dan juga memiliki dua orang bawahan yang disebut *bekel* atau *sesabat* yang masing-masing memimpin empat puluh orang.

Dalam masa pemerintahannya, Sultan Hamengku Buwana II melakukan perluasan dan penam bahan kesatuan prajurit kraton. Jumlah prajurit profesional kraton pada sekitar tahun 1808 telah mencapai 1.765 orang dan secara

<sup>6</sup>Purwadi, 2004. *Perjuangan Kraton Yogyakarta (Jasa Sri Sultan Hamengku Buwono I-X Dalam Kemakmuran Rakyat)*. Diva Press : Yogyakarta.

<sup>7</sup>Prajurit Kraton Yogyakarta, *Filosofi dan Nilai Budaya yang terkandung didalamnya*. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2008. hlm 9

<sup>5</sup> Djoko Marihandono, *op.cit.*, hlm. 56.

teori, dia dapat mengumpulkan pasukan sebanyak 100.000 prajurit lebih dari negeri-negeri taklukannya.<sup>8</sup> Para bangsawan dan pejabat tinggi kraton Ngayogyakarta juga diperkenankan memiliki kesatuan prajuritnya sendiri dengan syarat bahwa mereka harus tunduk dan setia kepada Sultan dan harus siap membantu apabila Sultan membutuhkan tenaga mereka.

Pihak kraton siap menyediakan perlengkapan dan persenjataan yang diperlukan oleh masing-masing kesatuan dari para bangsawan dan pejabat kraton. Persenjataan mereka pada umumnya berupa senapan dan senjata tajam (tombak, pedang, panah dan keris). Selain memiliki perlengkapan yang mendukung identitas pasukan masing-masing, mereka juga dengan para pelatih pasukan yang akan melatih kesatuan-kesatuan tersebut ditunjuk oleh kraton.

Sultan HB II telah mampu melakukan konsolidasi posisi dan kekuasaannya. Akibatnya, HB II memiliki pengaruh dan kekuasaan yang besar atas struktur dan kekuatan pasukan Kesultanan. Pengaruh tersebut mendukung dan memperkuat hegemoninya yang tampak dalam sikapnya yang berani menolak atau menentang tuntutan pemerintah Belanda jika mengancam posisi dan keutuhan Kesultanan Yogyakarta. Begitu juga sikap sultan pada Sunan PB IV menjadi semakin keras dan tidak mengenal kompromi. Para pejabat Belanda yang ditempatkan di Jawa tidak bisa berbuat banyak menghadapi Sultan HB II. Ketegangan ini tetap berlangsung hingga kedatangan Marsékal Daendels pada tahun 1808.

Bagi Daendels, semua raja dan penguasa Jawa ini merupakan vasal dari raja Belanda yang memerintah atas koloni ini, yang telah menyerahkan mandatnya kepada Gubernur Jendral Daendels untuk memerintah Jawa. Dengan demikian, semua penguasa di Jawa harus tunduk dan patuh kepada raja Belanda yang diwakilinya. Raja-raja yang tidak

mematuhi perintah Gubernur Jendral atau menolak bekerja sama dengan pemerintah akan dianggap sebagai musuh dan akan diturunkan dari tahtanya dan kerajaannya akan dihapuskan. Langkah pertama untuk melapangkan jalan bagi kebijakannya adalah dihapusnya organisasi pemerintahan di Pantai Timur Laut Jawa, jabatan komisaris kraton, serta jabatan residen.

Sebagai gantinya Daendels membentuk jabatan minister. Dengan statusnya yang tinggi dan kedudukannya yang strategis, minister harus diperlakukan secara terhormat. Daendles menetapkan dalam sebuah peraturan resmi, bahwa minister berhak untuk menerima perlakuan dan fasilitas yang mirip raja di kraton-kraton Jawa. Dengan peraturan tersebut, daendles berhasil menunjukkan kepada raja-raja Jawa bahwa wibawa Pemerintah Belanda harus ditegakkan dan diakui oleh raja-raja Jawa.

Kebijakan Daendles ini mendapatkan reaksi yang berbeda. Di Surakarta, Sunan PB IV tidak menyukai kebijakan Daendles tersebut. HB II menyadari bahwa tidak mungkin menolak tuntutan Daendles. Sementara itu di Yogyakarta, peraturan Daendles ini menimbulkan ketegangan baru. Sultan HB II menganggap bahwa kebijakan Daendels merupakan suatu penghinaan besar yang dilakukan oleh penguasa asing terhadap seorang raja Jawa. Di samping itu, sikap Sultan HB II yang anti-kolonial sejak dahulu telah mendasari penentangannya untuk menerapkan peraturan Daendles tersebut.<sup>9</sup>

Untuk itu Daendles bertekad untuk melakukan penghukuman terhadap Sultan HB II. Ia berniat untuk melakukan penyerangan ke kraton Yogyakarta dengan meminta bantuan pada Mangkunegoro II. Dengan rencana pengepungan ini, Daendles untuk terakhir kalinya mengirimkan peringatan kepada sultan HB II. Apabila Sultan HB II menolaknya,

<sup>9</sup>Djoko Marihandono, 2005, "Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Wilhem Daendles di Jawa 1808-1811: Penerapan Instruksi Napoleon Bonaparte", Disertasi FIB-UI.

<sup>8</sup> Ricklef : 2008, *Op cit.* hlm. 241

Daendles akan memerintahkan untuk menyerbu kraton Yogyakarta. Pada akhirnya Sultan HB II menyetujui untuk menerima ultimatum Daendles. Daendles tidak puas, Ia masih menuntut agar Sultan HB II meminta maaf, tetapi sultan tidak bersedia mengingat kewajibannya telah dipnuhi sehubungan dengan masalah minister.

### **Berakhirnya Pemerintahan Sultan Hamengku Buwono II**

Ketika berada di Jawa, Daendels menerima instruksi dari Raja Napoleon untuk mempertahankan pulau ini dari serangan Inggris. Dengan membawa instruksi tersebut, Daendels mulai melakukan inspeksi terhadap sistem pertahanan Jawa, yang hasilnya sangat buruk. Jaringan komunikasi sangat kurang dan sarana pertahanannya sangat lemah, di samping juga kondisi dan jumlah pasukan yang kurang memadai.

Oleh karena itu, program pertahanan disusun dengan cepat, Daendles memberikan prioritas pada sarana mobilisasi pasukan. Daendels memerintahkan pembangunan jalan raya dari ujung barat Jawa sampai ujung timur Jawa. Prioritas kedua adalah pembangunan infrastruktur pertahanan, mencakup perbentengan, kubu-kubu pertahanan, barak-barak pasukan, jembatan, parit-parit, dan gudang kebutuhan perlengkapan militer. Untuk rencana ini Daendles memerlukan fasilitas dan prasarana material, sehingga Daendles memerintahkan pada bupati untuk menyediakan kebutuhan ini.

Prasarana utama yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur, yaitu kayu jati, tidak bisa diperoleh dalam jumlah memadai. Daendels mempertimbangkan untuk meminta kayu dari raja Jawa, mengingat hutan-hutan itu bukan wewenang pemerintah Batavia. Pendekatan diplomatik akan Daendels lakukan memenuhi kebutuhan kayu untuk pembangunan. Pada tanggal 22 Juni 1810 atas nama Daendels minister P.Engelhar: 57 sa Sultan HB II dan Sunan PB IV untuk na tuntutan. Tuntutan itu berisi tentang

pengelolaan hutan-hutan kayu milik raja diserahkan pada pemerintah kolonial dengan imbalan ganti rugi tahunan yang akan langsung diberikan pada raja.<sup>10</sup>

Bagi kesultanan Yogyakarta, instruksi Daendels ini akan berdampak merugikan. Terutama dirasakan oleh Raden Ronggo Prawirodirjo, menantu Sultan HB II yang menjabat sebagai panglima pasukan pengawal raja. Hal ini karena Ia memiliki tanah apanage di wilayah Madiun. Wilayah kekuasaannya mencakup hutan-hutan kayu jati yang menjadi sumber pendapatan baik bagi Raden Ronggo maupun Sultan HB II. Akhirnya Raden Ronggo mengusulkan pada Sultan HB II untuk menolak tuntutan Daendels.

Mendengar ini kemudian Daendels memutuskan untuk menghukum Raden Ronggo karena menolak tuntutannya dan memberi peringatan pada Sultan HB II. Tanggal 12 November 1810, Sultan HB II menyampaikan pada Van Bram (minister kraton Yogyakarta) bahwa Raden Ronggo memang bersalah. Oleh karena itu HB II berjanji akan menyerahkan Raden Ronggo pada Daendels dan memenuhi tuntutan penyeteroran kayu.

Raden Ronggo menolak berangkat ke Batavia menemui Daendels. Sebaliknya Raden Ronggo meminta izin pada Sultan HB II untuk memulai perlawanan di daerahnya apabila tuntutan kayu tetap dilaksanakan. Pada tanggal 20 November 1810 Sultan HB II merestui Raden Ronggo. Raden Ronggo kemudian menemui Pangeran Notokusumo dan tumenggung Notodiningrat. Raden Ronggo menyatakan bahwa dirinya telah menerima restu dari Sultan HB II untuk memulai perlawanan pada Pemerintah kolonial Belanda. Raden Ronggo meminta agar mereka berdua menjaga

---

<sup>10</sup> 1999. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Jogjakarta*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta.

keamanan dan keselamatan Kasultanan Yogyakarta.

Daendels kemudian memerintahkan pasukan gabungan yang terdiri dari pasukan Belanda dibawah pimpinan Letnan Paulus. Pasukan Kasunanan dibawah pimpinan Tumenggung Sosrodipuro diikuti oleh legium Mangkunegaran. Sultan HB II yang menerima perintah dari Daendels untuk ikut mengirinkan pasukannya. Berdasarkan perintah itu HB II menunjuk Tumenggung Purwodipuro dan Tumenggung Sindunegoro.

Sultan HB II memerintahkan agar mereka membujuk Raden Ronggo untuk menyerahkan diri dan kembali ke Yogyakarta tanpa menimbulkan pertempuran darah. Karena HB II menghendaki lebih mengutamakan perdamaian daripada pertumpahan darah. Namun cara ini tidak berhasil dan pertumpahan darah itupun terjadi antara pasukan gabungan dengan pasukan Raden Ronggo.

Pada tanggal 21 Desember 1810, raden Ronggo terbunuh bersama Tumenggung Sumonegoro akibat gempuran pasukan gabungan. Setelah mendengar berita ini, Daendels memerintahkan agar jenazah Raden Ronggo dibawa ke Yogyakarta untuk diserahkan kepada Sultan HB II. Kemudian kecurigaanpun muncul di antara para pejabat Belanda bahwa Sultan HB II berada di belakang gerakan Raden Ronggo. Ini terbukti dari sebuah surat yang dilengkapi cap sultan yang terdapat di jenazah Raden Ronggo.

Sultan HB II membantah kecurigaan itu dengan mengatakan bahwa cap itu palsu, dan menurut alasannya bukan dirinya melainkan patih Danurejo II yang membuat surat tersebut. Untuk membuktikan bawa dirinya tidak terlibat, Sultan HB II memerintahkan untuk memakamkan jenazah Raden Ronggo dimakamkan di Banyusumurup, dekat Imogiri yang merupakan makam orang-orang hukuman terpidana yang dianggap membangkang perintah raja. Sebagai bukti ketidak terlibatannya dalam kasus Raden Ronggo ini, Kasultanan Yogyakarta ikut serta dalam penumpasan pemberontakan Raden Ronggo.

Namun Daendels tidak mau begitu saja menerima argumentasi ini. Atas laporan Patih Danurejo II. Ia mengetahui bahwa selain Raden Ronggo di dalam Kasultanan Yogyakarta juga terdapat konspirasi. Sejumlah nama kemudian dicatat oleh Daendels yaitu Notokusumo, Notodiningrat, Sumodiningrat dan juga Ratu Kencono Wulan. Ia menuntut penyerahan semua orang yang dicatatnya untuk diasingkan.

Bagi Daendels, peristiwa Raden Ronggo juga menjadi peluang besar untuk menekan sultan, yang selama ini selalu dianggap tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah kolonial dan selalu menentang perintahnya. Ia mengajukan tuntutan agar Sultan HB II menyerahkan tahtanya kepada putra mahkota. Menurutny Sultan HB II tidak lagi layak menduduki tahta di Kesultanan Yogyakarta karena tidak pernah bersedia bekerja sama dengan pemerintah kolonial. Jika sultan menolak tuntutan ini, HB II dituduh terlibat dalam pemberontakan Raden Ronggo dan harus mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah kolonial.<sup>11</sup>

Karena tidak ada pilihan lain dan mengingat perlawanan terhadap Daendels tidak akan menguntungkan baginya, Sultan HB II menyatakan kesediaannya untuk turun tahta. Permintaannya agar Rtu Kencono Wulan dan Tumenggung Sumodiningrat tidak dihukum dikabulkan oleh Daendels. Akan tetapi, usahanya untuk menyelamatkan Pangeran Notokusumo dan Tumenggung Notodiningrat tidak berhasil. Setelah kekuasaannya diserahkan kepada Putra Mahkota, Sultan HB II hidup sebagai seorang yang tidak lagi memiliki kekuasaan tetapi tetap tinggal dan berada di Kraton Yogyakarta.

Alasan mengapa Sultan HB II untuk tetap tinggal di kraton walaupun tahtanya telah diturunkan oleh Daendels karena HB II merasa tidak tega untuk melepaskan kasutanan Yogyakarta dengan cuma-cuma kepada VOC meskipun dibawah kepemimpinan anaknya

<sup>11</sup> Djoko Marihandono, *op.cit.*, hlm. 115.

sendiri. Dengan tetap berada di kraton Ia dapat tetap mengedalikan pemerintahan atas nama anaknya. Ia merasa bahwa tugasnya belum selesai sebagai sultan yang diidamkan oleh rakyatnya. Tugas ini yang menuntutnya untuk tetap bertahan dalam ketidakmampuannya. Namun tak mengubah fakta bahwa Inilah masa berakhirnya pemerintahan Sultan HB II yang pertama yaitu pada tahun 1810.

## KESIMPULAN

Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang merupakan hasil dari perpecahan Kerajaan Mataram Islam sebagai akibat dari adanya perjanjian Giyanti yang ditandatangani oleh tiga pihak yaitu VOC, Sunan Paku Buwono III dan Pangeran Mangkubumi. Dari sinilah awal berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada tahun 1755, yang menjadi Sultan pertamanya adalah Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi menjabat selama 37 tahun yaitu dari tahun 1755 sampai pada tahun 1792. Semasa memerintah Sultan HB I menyadari bahwa tidak selamanya dapat memegang tampuk pemerintahan, pada akhirnya Sultan HB I menunjuk seorang putra mahkota dari keturunannya. Dari sekian banyak putra yang dimilikinya Sultan HB I menunjuk RM.Sundoro sebagai penggantinya, dengan berbagai pertimbangan sebagai sultan. RM.Sundoro merupakan putra dari permaisurinya yang bernama Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten (GKR Kadipaten). Yang senantiasa setia mendampinginya membangun kraton yogyakarta.

Sultan Hamengku Buwono II (selanjutnya disebut Sultan HB II) merupakan sultan kedua di Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Sultan HB II menggantikan tahta ayahnya yaitu Sultan Hamengku Buwono I yang merupakan pendiri Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Sutan HB II menjabat sebagai raja di Kasultanan Yogyakarta dari tahun 1792 sampai pada tahun 1825 dengan tiga kali masa pemerintahan, dalam kurun waktu tersebut Sultan HB II mengalami naik turun tahta. Namun disini yang dibahas adalah

tahun pemerintahannya yang pertama yaitu tahun 1792 sampai pada tahun 1811.

Sultan HB II mengalami penurunan tahta sampai tiga kali masa pemerintahan, ini disebabkan sikapnya yang sangat anti pada Pemerintah Kolonial. Sultan HB II tidak mau bekerjasama dengan Pemerintah Kolonial. Sultan HB II menganggap bahwa seorang raja merupakan penguasa dari semua yang terdapat di wilayah kekuasaannya. Apabila Sultan HB II mudah untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kolonial, maka secara tidak langsung berarti memudahkan Pemerintah Belanda untuk dapat menguasai Kasultanan Yogyakarta melalui pemerintahannya. Dengan kata lain Sultan HB II tidak mau diperalat oleh Pemerintah Kolonial.

Sikap anti Belanda tersebut telah nampak sejak Sultan HB II belum menjadi Sultan di Kasultanan Yogyakarta. Melainkan masih menjadi pangeran (putra mahkota) yang mendampingi ayahnya untuk menjalankan tampuk pemerintahan. Sultan HB II beranggapan bahwa orang-orang Belanda merupakan sumber perpecahan yang menyebabkan berkurangnya wilayah Kerajaan Mataram dengan berbagai propagandanya. Selain masalah tersebut juga ada masalah lain yang menjadi alasan sikapnya tersebut. Masalah itu tidak lain adalah masalah penegakan wibawa seorang raja yang selama ini berusaha direndahkan oleh Pemerintah Kolonial, karena penyamaan status dengan para pejabat Belanda.

Berdasarkan pandangan tersebut Sultan HB II melakukan berbagai perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial. Ini merupakan nilai positif yang ditunjukkan oleh Sultan HB II dan juga nilai keistimewaan diantara Sultan Yogyakarta yang lainnya. Nilai positif yang lain adalah karya-karya yang diciptakannya pada saat Sultan HB II memerintah dapat bertahan dan tetap lestari hingga saat ini yang berupa karya sastra dan seni. Karena beliau menyadari bahwa raja-raja Jawa disegani saat memerintah dan dapat dilupakan setelah turun

tahta apabila raja tersebut tidak dapat berkesan terhadap rakyatnya.

Sultan HB II yang sangat paham terhadap hal tersebut kemudian melakukan perubahan disegala bidang dan juga melakukan pembangunan. Perbedaannya dengan Sultan pendahulunya yaitu Sultan HB I, adalah pada masa pemerintahannya Sultan HB I lebih berkonsentrasi terhadap pembangunan kraton dan penataan Kasultanan. Namun pada masa pemerintahan Sultan HB II, lebih berkonsentrasi pada kesenian, pelestarian budaya, pembelaan tradisi dan kekuasaan seorang raja. Dengan demikian menjadikan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat menjadi kokoh dan kuat sampai pada masa sekarang, walaupun pada sistem kesultananya terjadi tarik ulur untuk diganti dengan sistem pemerintahan yang sekarang diterapkan di negara demokrasi.

Mengingat perjuangan Sultan HB II, penulis lantas dapat mengambil pelajaran bahwa kemapanan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk berpangku tangan terhadap segala penindasan yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Dilihat dari status sosial, kedudukan Sultan Hamengku Buwono itu tinggi sekali. Meskipun demikian, Sultan HB II tetap gigih membela harkat dan martabat kasultanaanya yang telah diremehkan penjajah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Tradisional:

Arsip kontrak politik antara Sultan Hamengku Buwono II dengan VOC tentang *Pengangkatan Sultan Hamengku Buwono II sebagai sultan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat*, koleksi Arsip Nasional Indonesia.

“*Treaty between Sultan Djogjakarta and English – East India Compagnie*” 6 stuken (ANRI). Karesidenan, No. 269

*Babad Mangkubumi* (PUPUH LXXII, Pangkur)

### Sumber artikel:

Adaby, Ahmad. *Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta*. Yogyakarta. Yayasan Kebudayaan Islam Indonesia: 2007

Aminuddin Kasdi, 2001, *Memahami Sejarah*. Surabaya : Unesa Press.

Aminuddin Kasdi, 2003, *PerlawananPenguasa Madura Atas Hegemoni Jawa*, Yogyakarta : Jendela.

B.Hestu Cipto Handoyo, 1998. *Kilas Balik Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Atmajaya University Press : Yogyakarta.

Budiono, Heru. *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta. Hanindita: 1987.

Daldjoeni, 1992, “Geografi Kesejarahann II” –Alumni).

Djoko Dwiyanto, 2009. *Kraton Yogyakarta Sejarah, Nasionalisme dan Teladan Perjuangan*. Paradigma Indonesia : Yogyakarta.

Djoko Suryo, Jandra, 2007. *Model Kehidupan Bermasyarakat Dalam Khasanah Budaya Kraton Yogyakarta*. YIKII : Yogyakarta.

Dudung Abdurachman. 1999. *Metode Penelitisan Sejarah*. Jakarta: logos Wacana Ilmu.

Graf, .J. de, 1987, *Runtuhnya Kraton Mataram*, Jakarta:Graffiti Pers.

IMA, 2008. *Kraton Jogja, Sejarah dan Warisan Budaya*. PT.Indonesia Kebanggaanku : Yogyakarta.

Karkono, Partokusumo. *Falsafah Kepemimpinan dan Satria Jawa*. Jakarta. Bina Rena Pariwara: 1998.

Margana, S., 2004, *Kraton Surakarta dan Yogyakarta 1769-1874*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Marihandono Djoko, 2005, “*Sentralisme Kekuasaan Pemerintahan Herman Wilhem Daendles di Jawa 1808-1811: Penerapan Instruksi Napoleon Bonaparte*”, Disertasi FIB-UI.

\_\_\_\_\_, 2006, *Sultan Hamengku Buwono II Pembela*

- Tradisi Dan Kekuasaan Jawa*, Bandar Aji : Yogyakarta.
- Moedjiyanto. *Konsep Kepemimpinan dan kekuasaan Jawa Tempo Dulu* dalam Hans Antlov, *Kepemimpinan Jawa: Perintah Halus, Pemerintahan Otoriter*. Jakarta. Yayasan Obor: 2011.
- Pangestu, Ageng Rama. *Kebudayaan Jawa: Ragam Kehidupan Kraton dan Masyarakat di Jawa 1222-1998*. Yogyakarta: 2007.
- PEMPROF DIY, 1996. *Sejarah Pembangunan Pemerintahan Provinsi DIY*.
- Purwadi, 2004. *Perjuangan Kraton Yogyakarta (Jasa Sri Sultan Hamengku Buwono I-X Dalam Kemakmuran Rakyat)*. Diva Press : Yogyakarta.
- Raffles, 1965. *History Of Java*. Oxford University prees : New York.
- Ricklefs, M.C., 1974, *Jogjakarta Under Sultan Mangkubumi 1749-1792*, London: Oxford University Press.
- Ricklef, 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Serambi Ilmu Semesta : Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo,. 1982. *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia .
- \_\_\_\_\_. 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 Dari Emporium Sampai Imperium*. Jilid I. Jakarta: Gramedia.
- Sastronaryatmo, Moelyono, 1981, *Babad Mangkubumi*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
1999. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan Kolonialisme di Daerah Istimewa Jogjakarta*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : Jakarta.
- Soedarsiman PoerwoKoesoemo, 1985. *Kadipaten Pakualaman*. Gajah Mada University Press : Jogjakarta.
- Soemardjo Nitinegoro, 1980. *Sejarah Berdirinya Kota Kebudayaan Ngayogyakarta Hadiningrat*. Putra Jaya : Yogyakarta.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2009. *Menggugat Keistimewaan Jogjakarta*. Pinus : Yogyakarta.
- Sutrisno Kutoyo, dkk, 1997. *Sejarah Daerah-daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Uka Tjandrasasmita (ed.). 1993. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid III*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Yosodipuro, R., 2001, *Babad Giyanti III*, Yogyakarta: Badan Perpusda Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Jurnal :

- Carey, Peter. *A New Acquisition For The Library Of The Koninklijk Instituut: Translated Copies Of The John Crawford Collection Of Javanese Reports, Originals Letters And Land Grants From The Yogyakarta Gourt (1772—1812)*. KITLV: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde vol 135 No 2 (1979)
- Resink, G. *Het verbond tussen Sultan Mangkubumi en de V.O.C*. KITLV: Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde vol 135 no: 2/3 (1979)